

RENCANA KERJA (RENJA) REVISI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2027



Jl. Wastukencana No.2 Bandung
Tlp.022-4234892,email diskominfo@bandung.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, khususnya dalam rencana tahunan. Disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027. Penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2027.

Buku Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Namun demikian kita menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada rencana tahunan ini, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, 3 Agustus 2026

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



Henryco/Arie Sapiie, SE.AK
Nip. 197106211998061001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lampiran Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).....	13
2.2 Evaluasi Capaian SPM tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan Terkait)	18
2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis	18
2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.....	43
2,5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027.....	48
3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB V PENUTUP	90

Lampiran-lampiran Tabel dan Gambar	
	Halaman
Tabel 2.1.....	15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	
Tabel 2.2.....	20
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel 2.3	28
Isu Strategis Dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung	
Tabel 2.4	
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan) Kota Bandung	
Tabel 3.1.....	50
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 Sebelum Revisi	
Tabel 3.2.....	50
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 Setelah Revisi	
Tabel 3.3.....	52
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Diskominfo sebelum Revisi	
Tabel 3.4.....	53
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Diskominfo setelah Revisi	
Tabel 4.1.....	61
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kota Bandung sebelum Revisi	
Tabel 4.2.....	71
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kota Bandung setelah Revisi	

Tabel 5.1	85
Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kota Bandung Tahun 2025-2030 Sebelum Revisi	
Tabel 5.2	85
Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kota Bandung Tahun 2025-2030 Setelah Revisi	
Tabel 5.3	86
Capaian Kinerja IKU Tahun 2025	
Tabel 5.4	86
Indikator Kinerja Kunci 2025-2030 sebelum Revisi	
Tabel 5.5	87
Indikator Kinerja Kunci 2025-2030 setelah Revisi	
Tabel 5.6	88
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk

mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Disamping itu pula penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni: Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun Renstra, Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Kerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian; yang meliputi; Perencanaan komunikasi, diseminasi informasi, teknologi informasi, Persandian (Keamanan Aplikasi); melaksanakan pelayanan teknis

administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
10. Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja_Revisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 adalah :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2027;
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;
- 3) Menjadikan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 4) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027.
- 5) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.
<i>BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025</i>	Menguraikan Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029); Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait); Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra; Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja; Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis; Telaah pokok-pokok pikiran DPRD dan Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
<i>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</i>	Menguraikan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) dan Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra

	Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
<i>Bab IV Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah</i>	Bab ini menguraikan: 1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. 2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.
<i>Bab V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</i>	Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi: 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. 2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
<i>BAB V Penutup</i>	Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja tahunan



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Ada 2 indikator Indikator Kinerja Utama, Pada Tahun 2025 dari 2 indikator melebihi target yaitu; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk Tahun 2026 dari target 2 indikator ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target, sedangkan proyeksi tahun 2027 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diproyeksikan juga optimis dapat terealisasi dengan baik.

Analisis Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yaitu ada 5 indikator yang terdiri dari 3 urusan, yaitu;

1. Urusan Komunikasi dan Informatika ada 3 indikator, yaitu; a. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo; b. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang

- terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan C. Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
2. Urusan Statitik ada 1 indikator, yaitu; Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
 3. Urusan Persandian ada 1 indikator, Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah esemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Untuk lebih jelas dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,50	4,62	4,65	4,68	4,59	4,66	4,77	4,77	IKU 2025-2029
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	88,40	88,50	88,60	95,89	96,05	88,50	88,60	IKU 2025-2029
			Indikator Kinerja Kunci (IKK)									
1			Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau	13,09%	7,14%	100%	100%	100%	100%	100	100	

			unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo									
2			Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	13,09%	30%	100%	100%	100%	100%	100	100	
3			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	84%	90%	95%	100%	100%	100%	100	100	
4			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,02	3.025	3,03	3.035	3,02	3.025	3.035	3,04	
5			Tingkat kesiapan	64	67	69	72	64	67	72	75	

			pengamanan informasi pemerintahan daerah									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap warga negara secara minimal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tidak memiliki SPM dari Tahun 2023-2025, sehingga tidak dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan di tahun mendatang. Namun demikian dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat tetap mengacu pada pedoman yang berlaku terutama Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan dari masing-masing unit layanan.

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Permasalahan eksternal dan internal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

- a. Nilai capaian Index SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas. Dikarenakan masing-masing OPD memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya.
- c. Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas.
- d. Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan;
- e. Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.

- f. Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
- g. Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
- h. Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.
- i. Belum optimalnya daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.

Penyebab dari permasalahan yaitu;

- a. Masih kurang memahami penerapan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya diskominfo.
- b. Belum adanya kajian kebutuhan layanan internet ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif.
- c. Kurangnya bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan.
- e. Belum membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
- f. Belum adanya dukungan kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
- g. Perlu diadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.

- h. Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik.
- i. Perlu daya dukung perangkat daerah terkait urusan persandian dengan meningkatkan SDM dan keamanan informasi.

Dari permasalahan dan pokok masalah dapat tersebut di atas, maka dapat di liat dari Tabel 2.8 di bawah ini;

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Pemahaman tentang Pemerintah Digital (Pemdi)/SPBE di masing-masing perangkat daerah	Nilai capaian Indeks Pemdi/SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.	Masih kurang memahami penerapan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya diskominfo.
2	Kebutuhan internet sangat tinggi	Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas. Dikarenakan masing-masing OPD memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya.	Belum adanya kajian kebutuhan layanan internet ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif.
3	Kebutuhan media sosial tinggi sebagai sarana informasi	Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas.	Kurangnya bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD.

4	Kurang maksimalnya layanan kegawatdaruratan	Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan	Kurang optimalnya koordinasi antara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan
5	Belum memiliki UPT.Layanan Informasi	Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan system informasi.	Belum membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan system informasi
6	Belum maksimalnya integrasi aplikasi	Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini	Belum adanya dukungan kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal
7	Kurangnya SDM tentang Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang	Perlu diadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
8	Perlunya peningkatan SDM tentang statistik	Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah, sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.	Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik
9	Kurangnya SDM Persandian	Belum optimalnya daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.	Perlu daya dukung perangkat daerah terkait urusan persandian dengan meningkatkan SDM dan keamanan informasi.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan isu-isu strategis ditingkat kota.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan kominfo, statistik dan persandian di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 2.3
Isu Strategis dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi aplikasi, karena dari 281 aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, baru 110 aplikasi yang sudah terintegrasi, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju <i>smart city</i> level “ <i>smart</i> ”.

		2. Meningkatkan wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di Perangkat Daerah.
2	URUSAN STATISTIK	Mengoptimalkan manajemen data dan layanan data, dari proses perencanaan data, pengumpulan, pengolahan hingga publikasi data, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan secara berkelanjutan.
3	URUSAN PERSANDIAN	Mengoptimalkan daya dukung terkait urusan persandian dan keamanan sistem informasi, yang mencakup tata kelola sistem manajemen keamanan informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia keamanan informasi serta pemenuhan perangkat teknologi siber terkini guna mendukung kinerja.

• Sumber : Diskominfo Kota Bandung

Evaluasi Hasil Renja Diskominfo Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Tahun 2025 telah melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian. Terhadap urusan tersebut akan evaluasi sebagai berikut;

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.022.187.997,- terealisasi sebesar Rp. 19.114.410.340,- (95,47%);
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 280.658.565,- terealisasi sebesar Rp. 263.320.000,- (93,82%);

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.011.788,- terealisasi sebesar Rp. 72.839.450,- (95,83%);
 - c. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan 20.653.154,- terealisasi sebesar Rp. 20.050.000,- (97,08%);
 - d. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.108.960,- terealisasi sebesar Rp. 126.108.960,- (100%);
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas 453.974.489,- terealisasi sebesar Rp. 443.071.400,- (97,60%);
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 132.631.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.491.114,- (99,89%).
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.793.227,- (68,28%)
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.122.390.923,- terealisasi sebesar Rp. 2.119.505.496,- (99,86%).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.299.600,- terealisasi sebesar Rp. 874.641.700,- (87,44%);
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan ini dengan pagu Rp. 119.679.000,- terealisasi Rp. 115.621.000,- (96,91%).

B. PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ada 8 sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub Kegiatan Relasi Media, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 5.236.079.190,- terealisasi sebesar Rp. 5.229.214.590,- (99,87%);
- b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 258.998.000,- terealisasi sebesar Rp. 243.743.840,- (94,11%);
- c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp1.036.256.750,- terealisasi sebesar Rp. 1.018.470.300,- (98,28%);
- d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 602.669.097,- terealisasi sebesar Rp. 596.766.461,- (99,02%);
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 1.254.720.900,- terealisasi sebesar Rp. 1.244.061.745,- (99,15%);
- f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 1.086.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.081.000.000,- (99,54%);
- g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 311.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 295.021.501,- (94,80%);
- h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu sebesar Rp. 396.005.608,- terealisasi Rp. 390.037.500,- (98,49%).

C. PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, , yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.649.634.779,-

- terrealisasi sebesar Rp. 7.615.221.484,- (99.55%);
- b. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 478.596.207,- terealisasi sebesar Rp. 478.352.090,- (99,95%);
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 476.503.600,- terealisasi sebesar Rp. 472.694.780,- (99,20%);
 - d. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.164.632.900,- terealisasi sebesar Rp. 1.136.312.740,- (97,57%);
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 268.756.806,- terealisasi sebesar Rp. 268.501.200,- (99,90%);
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, Sub kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 510.420.730,- terealisasi sebesar Rp. 509.667.280,- (99,85%);
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 520.566.032,- terealisasi sebesar Rp.516.386.568,- (99,20%);
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Sub Kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp. 5.474.997.482,- terealisasi Rp. 5.470.114.816,- (99,91%).

D. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 232.777.600,- terealisasi sebesar Rp. 232.179.300,- (99,74%);

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 436.266.650,- terealisasi sebesar Rp.435.076.201,- (99,73%);
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 210.973.660,- terealisasi sebesar Rp. 210.775.400,- (99,91%).

**E. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI**

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 409.024.208,- terealisasi sebesar Rp. 389.123.400,- (95,13%).

Dari hasil kinerja program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027 sesuai dengan target yang telah ditentukan, terutama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 (tahun berjalan)
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2026(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.77	4,59	4.62	4,66	100,87%	4,65	4,66	97,70
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	10.00	45.45	10,00	10,00	100,00	10,00	45.45	455,00

						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	16,20	31.50	16,20	16,20	100,00	16,20	31.50	194,45
						Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	3	3	3	100,00	3	3	60,00
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	10.00	7.40	10.00	10.00	100,00	10.00	31,30	313.00
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi'	130	90	94	94	100	114	94	72,31
						Cakupan leveling Pemerintahan Digital	5	NA	1	1	100	1	1	20
						Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

2	16	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	- Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	34	34	34	34	100	34	34	100.00
2	16	03	2,02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	- Jumlah laporan Perencanaan TIK	6	2	2	2	100	2	4	66,67
2	16	03	2,02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	12	4	4	4	100	4	8	66,67
2	16	03	2,02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah aplikasi yang dikelola	15	5	5	5	100	5	10	66,67
2	16	03	2,02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	16	03	2,02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	6	2	2	2	100	2	4	66,67
2	16	03	2,02	10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	6	2	2	2	100	2	4	66,67

2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	5,80	4,5	3,30	4,50	136,37	5,80	4,50	77,59
2	20	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15	3	3	3	100	3	12,00	80.00
2	20	02.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah publikasi data dan infografis	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	20	02.2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah Data Terbuka Terstandar	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	20	02.2	01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otoritasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									

2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	1,37	1,30	1,30	1,30	100,00	1.37	1,30	94,89
2	21	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	21	10	7	10	142,86	7	10	80,96
2	21	02.2	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	21	10	7	10	142,86	7	10	80,96
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100,00	100
2	16	01.2	01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00	100

2	16	01.2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	16	01.2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100,00	100
2	16	01.2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	3	1	1	1	100	1	2,00	66,67
2	16	01.2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00	100
2	16	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor terdida	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK dan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36	12	12	12	100	-	12.	66,67

2	16	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	6	2	2	2	100	2	2	66,67
2	16	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00	100
2	16	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	36	12	12	12	100	12	12.	66,67

2	16	01.2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00	100
2	16	01.2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	29	29	36	12	100	29	29	100
2	16	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit perbaikan peralatan kantor	36	12	12	12	100	12	12.	66,67
2	16	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	3	1	1	1	100		1	33,34
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3,0	2,00	2,40	3,0	100,00	3,0	3,0	100.00
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	99,43	100	98,33	98,33	100%	99,62	99,62
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	0,5	0,4	0,4	100,00	0,4	0,4	100

						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,60	82,35	88,40	88,51	100,13	88,50	88,55	100.06
2	16	02	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	12	4	4	4	100	4	8	66,67
2	16	02	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	9	3	3	3	100	3	6	66,67
2	16	02	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Studio Radio yang dikelola	6	2	2	2	100	2	4	66,67
2	16	02	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan informasi publik	12	4	4	4	100	4	8	66,67
2	16	02	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	- Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	12	4	4	4	100	4	8	66,67

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari uraian dan tabel yang disajikan di atas, ada hambatan dan solusi yang dapat menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kinerja tahun selanjutnya, yaitu;

1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK,

Dukungan : Koordinasi dengan Pewarta Balaikota Bandung (PBB), media daring dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung memudahkan penyampaian informasi/klarifikasi/sosialisasi dan edukasi pada Program Bandung Menjawab menjadi lebih akurat karena informasi diperoleh langsung dari OPD terkait.

Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi terkait layanan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diantaranya melalui media cetak, media elektronik (website PPID), dan media sosial PPID Kota Bandung.

Saat ini, permohonan informasi Pemerintah Kota Bandung juga dilakukan secara digital dan satu pintu, yaitu melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/ <https://ppid-simonik.bandung.go.id/>). Hal ini juga diperkuat oleh koordinasi antara Diskominfo selaku PPID Utama dengan 77 PPID Pembantu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah baik dinas, badan, bagian, kecamatan, BLUD, dan BUMD, serta 347 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dari tingkat SMP Negeri hingga tingkat SD Negeri di Kota Bandung. Koordinasi yang kuat antar PPID Pembantu, dan PPID Sub Pembantu satker Pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai SOP, dan setiap tahun melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, menyiapkan desk layanan informasi di Mall Pelayanan Publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker

Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Koordinasi dengan OPD, lembaga dan organisasi lainnya berkaitan dengan isu hangat yang terjadi di Kota Bandung.

Sementara itu dari segi layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID perlu dilakukan penguatan teknis SDM dalam penggunaan layanan SIMONIK, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) itu sendiri. Serta sosialisasi keterbukaan informasi public kepada masyarakat Kota Bandung.

Sementara itu untuk layanan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya Bimbingan Teknis dan sosialisasi terkait layanan keterbukaan informasi publik bagi PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan serta warga Kota Bandung, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut.

Koordinasi dengan admin LAPOR! pada instansi di Pemerintah Kota Bandung membuat pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Hambatan : Sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehubungan dengan lokasi Bandung Menjawab selalu berpindah. Ada kalanya narasumber yang hadir bukan pucuk pimpinan dan pengambil keputusan.

Mutasi dan Rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung membuat sering terjadinya perubah admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam menindaklanjuti pengaduan dikarenakan diperlukannya pelatihan kepada admin yang baru.

Solusi : Melengkapi sarana dan prasana pendukung Bandung Menjawab seperti penguatan jaringan internet (kabel streaming), alat-alat broadcast dan lainnya. Diharapkan narasumber yang hadir adalah pengambil keputusan sehingga informasi yang disampaikan tepat waktu.

Untuk pengelolaan pengaduan diperlukan bimbingan teknis secara rutin kepada para admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan juga diperlukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, sosialisasi melalui tatap muka, media luar ruang (seperti cetak spanduk, x-banner dan baliho).

2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

a. Lingkup Aplikasi

Pendukung :

Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur.

Hambatan :

1. Masih adanya regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan Administrasi
2. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan.
3. Dukungan dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Menyusun draft peraturan perundangan
2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

b. Lingkup Perencanaan**Dukungan :**

Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE , Arsitektur, Peta rencana dan manajemen

Hambatan :

1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan
2. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk memenuhi semua tingkat manajemen SPBE

Solusi :

1. Pemenuhan Anggaran kegiatan untuk mendukung Kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE
2. Memulai persiapan lebih awal terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan kebijakan internal SPBE, Tatakelola dan Manajemen SPBE
3. Menambah jumlah SDM untuk manajemen SPBE

c. Lingkup Infrastruktur

Hambatan :

1. Berkurangnya alokasi layanan bandwidth OPD sehingga layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung berjalan kurang optimal.
2. Sumber daya TIK (storage server, processor, memori) yang tersedia semakin sedikit karena adanya pengembangan aplikasi-aplikasi yang semakin besar.
3. Perangkat pendukung keamanan sistem informasi yang belum memadai untuk mendeteksi dan melindungi server dan aplikasi dari serangan siber.

Solusi :

Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth untuk akses internet perangkat daerah dalam rangka optimalisasi manajemen dan monitoring bandwidth perangkat daerah serta Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung. Melaksanakan kajian cellplan menara telekomunikasi serta telah tersusunnya dokumen manajemen aset TIK yang lengkap dan terstruktur. Melengkapi sistem proteksi server dengan perangkat firewall dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya TIK server (storage, processor, memori), dilakukan pemanfaatan Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo, dan Server dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat

3 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Hambatan : Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan pengembangan aplikasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi (SIPEDASI) dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data. Namun berdasarkan hasil evaluasi, keterbatasan sumber daya

di Perangkat Daerah mengakibatkan tumpang tindihnya beban kerja sehingga mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Solusi : Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya pada Perangkat Daerah.

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dukungan :

- a) Telah diraihnya sertifikasi ISO 27001 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- b) Telah dilakukan audit keamanan SPBE;
- c) Terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BSSN.
- d) Meningkatkan perlindungan data dengan instalasi Sandi Data oleh BSSN.
- e) Verifikasi Indeks KAMI oleh BSSN.

Permasalahan:

- a) Jumlah SDM TIK untuk pengembangan sistem informasi masih kurang.
- b) Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.
- c) Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
- d) Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
- e) Kurangnya SDM yang kapasitas dan kompetensinya memadai dalam lingkup persandian dan keamanan informasi;

- f) Pengelolaan SMKI belum optimal
- g) Pengelolaan Tim Tanggap Insiden Siber berikut tools (SIEM dan SOC) belum optimal
- h) Belum tersedianya tools/alat sensor keamanan informasi.

Solusi :

- b. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM TIK untuk pengembangan sistem informasi.
- c. Membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
- d. Mendorong kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
- e. Mengadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
- f. Sudah mengajukan formasi untuk Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika untuk pemenuhan SDM lingkup persandian dan keamanan informasi. Mengikuti bimtek/ pelatihan dari BSSN dan KonsultanMerekrut tenaga ahli/ konsultan perorangan yang berkompeten di bidang keamanan sistem informasi.Dan pada tahun 2024 ini menambah tenaga pranata komputer dari P3K sebanyak 2 orang untuk ditempatkan pada Seksi Persandian dan Keamanan Sistem Informasi.
- g. Mengadakan pendampingan ISO 27001 dan Indeks KAMI guna meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi
- h. Melakukan asistensi dan bimtek dengan BSSN terkait pemanfaatan SIEM dan juga bimbingan teknis pengelolaan tim tanggap insiden siber dan mengoptimalkan tools yang ada.

- i. Penambahan anggaran untuk pembelian firewall guna mendukung sarana dan prasarana keamanan informasi.

2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam masa reses anggota DPRD Kota Bandung Tahun 2026, banyak menyampaikan kebutuhan akan pengadaan CCTV di lingkungan masyarakat.

Kebutuhan CCTV di Kota Bandung ini, karena dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kota-kota di Indonesia, termasuk di Kota Bandung, mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, maupun mobilitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum juga semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih modern, sistematis, dan berbasis teknologi.

Kota Bandung sendiri telah menerapkan pemasangan CCTV di banyak tempat. Namun, dengan makin aktifnya kegiatan Masyarakat, jumlah CCTV yang telah terpasang pun dirasa masih perlu untuk dilakukan penambahan. Masyarakat membutuhkan jaminan keamanan yang lebih baik, dan pemerintah kota membutuhkan alat yang lebih andal dan efisien untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan ini bukan hanya sekadar kebutuhan, melainkan sebuah langkah strategis untuk melindungi warga dan aset kota.

Dari hasil reses tersebut, telah diakomodir sebanyak 19 usulan pengadaan CCTV di kewilayahan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.479.523.327,- yang akan dimasukkan ke dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam layanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada masyarakat melalui berbagai inovasi, yaitu;

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Peta dan Rencana Arsitektur SPBE

j.

Telah disusun Kepwal 486/kep.1186-diskominfo 2024 tentang arsitektur SPBE 2024-2028 dan juga Peta Rencana SPBE 2024-2029.

- Sadayana Bandung Super upp.
Pemerintah Kota Bandung telah membangun berbagai sistem layanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui platform digital yang lebih efisien, transparan, serta aman.

Saat ini Pemerintah Kota Bandung, melalui Diskominfo sedang merintis suatu platform aplikasi yang diproyeksikan akan mengintegrasikan berbagai layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu **Sadayana Bandung Superapp**.

Superapp merupakan platform terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan dan informasi dalam satu aplikasi, memberikan pengalaman "all-in-one" bagi pengguna. Model ini selaras dengan tujuan Smart City yang telah menjadi bagian dari Rencana Strategis Diskominfo Kota Bandung

- Layanan Integrasi Aplikasi

Pada saat ini Pemerintah Kota Bandung memiliki 281 aplikasi, terdiri dari Lingkup layanan publik sebanyak 169 aplikasi dan Lingkup administrasi pemerintahan sebanyak 112 aplikasi. Lingkup layanan publik sebanyak 54 aplikasi yang sudah diintegrasikan; 95 aplikasi yang perlu diintegrasikan dan 28 aplikasi yang belum diintegrasikan atau prosentase aplikasi layanan sebanyak 56,8% sudah diintegrasikan. Sedangkan Lingkup administrasi sebanyak 81 aplikasi yang perlu diintegrasikan, 34 aplikasi yang belum diintegrasikan dan 56 aplikasi yang sudah diintegrasikan atau 69,1 % prosentase aplikasi yang sudah diintegrasikan pada lingkup administrasi pemerintahan.

- Layanan CCTV
- Bandung Command Center (BCC)
- Layanan Integrasi Informasi;
LAPOR, Media Sosial (@humas_bandung, @ppidlaporkotabandung, @bandungsiaga112, Facebook, Instagram, Aplikasi X dll)
- Anti Hoax
- Radio Sonata

b. Urusan Statistik

Bandung Satu Data

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung Bahwa Diskominfo ditunjuk sebagai walidata dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial daerah yang menunjuk Diskominfo sebagai unit penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan.

Data One map police sebetulnya sudah dikumpulkan sejak Tahun 2016 ke peta tematik di Dinas Ciptabintar, tetapi ada kendala internal di Disciptabintar untuk pemanfaatannya.

Secara kualitas, peta Kota Bandung sudah sangat baik karena sudah dalam skala 1:1000 (anjuran dari RTRW Nasional dan UU Tata Ruang, kab/kota skala yang dibutuhkan untuk perencanaan adalah 1:5000), tetapi pemanfaatannya masih terbatas oleh beberapa perangkat daerah

c. Urusan Persandian

Layanan keamanan data informasi pada aplikasi, baik yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung maupun aplikasi yang dimiliki perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, namun demikian seiring dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan dari SPBE ke Pemerintah Digital.

Perjalanan dari SPBE menuju Pemerintah Digital merupakan evolusi dari digitalisasi proses pemerintahan menuju transformasi cara kerja pemerintahan. Pada tahap SPBE, pemerintah berupaya membangun dan mengintegrasikan sistem elektronik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Namun, keberadaan berbagai aplikasi dan sistem elektronik belum secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang terintegrasi apabila masih terdapat proses yang terfragmentasi, data yang tersebar, serta layanan yang dirancang berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan internal pemerintah.

Pemerintah Digital membawa perubahan paradigma. Fokusnya bergeser dari *government-centric* menjadi *citizen-centric*, dari

membangun aplikasi sebanyak-banyaknya menjadi membangun layanan digital yang terpadu, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Data dipandang sebagai aset strategis pemerintah, interoperabilitas menjadi kebutuhan utama, dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, analitik data, komputasi awan, serta identitas digital dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan yang lebih proaktif dan personal.

Dengan demikian, Pemerintah Digital bukan sekadar SPBE yang lebih canggih, melainkan perubahan mendasar dalam ekosistem pemerintahan. Transformasi mencakup proses bisnis, kelembagaan, regulasi, SDM, data, infrastruktur, keamanan, serta budaya kerja. Pemerintah tidak lagi hanya menyediakan layanan ketika masyarakat mengajukan permohonan, tetapi secara bertahap bergerak menuju layanan yang proaktif, terintegrasi, berbasis data, dan hadir sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, arah perubahan tersebut dapat dipahami sebagai perjalanan dari “pemerintah yang menggunakan teknologi” menuju “pemerintah yang ditransformasi oleh teknologi digital.” Ukuran keberhasilannya pun tidak lagi semata-mata jumlah aplikasi atau tingkat kematangan sistem, tetapi sejauh mana transformasi digital mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, adaptif, efisien, transparan, responsif, dan memberikan pengalaman layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 memiliki target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027
Sebelum Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET
			2027
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	81
1.1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4.68 (Memuaskan)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,92

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027
Setelah Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET
			2027

1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	81
1.1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lingkup Kewenangan Diskominfo	2,0
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,07

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Tahun 2025-2029, RKP 2027, RKPD Tahun 2027 dan Kebijakan nasional/daerah lainnya.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, maka Diskominfo Kota Bandung menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan menyandingkan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut;

TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISKOMINFO
Sebelum Revisi

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah; Pelaksanaan SPBE berdasar pada; 1. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE 3. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	1. Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima 2. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 3. Perwujudan e-government dan smart city	1.Integrasi pelayanan di seluruh instansi melalui integrasi aplikasi 2.Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 3.Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan TIK 4.Memberikan kesempatan SDM Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya	

TABEL 3.4

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027_Revisi

TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISKOMINFO

Setelah Revisi

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan rangkaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terpadu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Operasional tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi, tetapi mencakup pengelolaan proses bisnis, data, layanan, sumber daya manusia, keamanan, serta integrasi antarinstansi. Pelaksanaan Pemerintah Digital berdasar pada; Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi)	4. Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima 5. Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 6. Perwujudan e-government dan smart city	1.Integrasi pelayanan di seluruh instansi melalui integrasi aplikasi 2.Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 3.Mendorong Perangkat Daerah untuk menggunakan TIK 4.Memberikan kesempatan SDM Diskominfo untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya	

Seiring dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menyelaraskan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya.

Ada beberapa kebijakan nasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusannya yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.
2. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:
 - a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik.
 - b. Penguatan media-media lokal dan alternative sebagai sumber informasi utama masyarakat,
 - c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi,
 - e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,
 - f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya,
 - g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis,
 - h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI;

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah bidang Pemerintah Digital diarahkan untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi, berbasis data, berorientasi

pada kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang memadai.

Transformasi tersebut dilakukan dengan menggeser pendekatan dari pembangunan sistem dan aplikasi yang terfragmentasi menuju ekosistem Pemerintah Digital daerah yang terpadu. Pemerintah daerah tidak lagi berfokus pada jumlah aplikasi yang dibangun, tetapi pada keterhubungan proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan layanan sehingga menghasilkan proses pemerintahan yang lebih efektif serta pelayanan publik yang sederhana, cepat, mudah diakses, dan responsif.

Kebijakan juga diarahkan pada penguatan tata kelola data sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis bukti. Data sektoral dan kewilayahan perlu dikelola secara berkualitas, terintegrasi, aman, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pengendalian program, evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah perlu memperkuat kapasitas transformasi digital, baik melalui peningkatan kompetensi ASN, penguatan kelembagaan dan tata kelola, penerapan arsitektur digital, maupun pengembangan budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi baru, termasuk analitik data dan kecerdasan artifisial, diarahkan secara selektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Seluruh transformasi tersebut harus disertai dengan penguatan keamanan siber, perlindungan data, interoperabilitas, dan keberlanjutan infrastruktur digital, sehingga ekosistem Pemerintah Digital daerah tidak hanya efektif dan inovatif, tetapi juga terpercaya dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dapat dikelompokkan menjadi 7 agenda utama:

1. Penguatan tata kelola Pemerintah Digital daerah
Menyelaraskan kebijakan, kelembagaan, arsitektur, regulasi, pembiayaan, dan mekanisme koordinasi transformasi digital daerah.
2. Integrasi layanan dan proses bisnis pemerintahan
Menyederhanakan proses bisnis dan mengintegrasikan layanan lintas perangkat daerah untuk mengurangi duplikasi serta menciptakan pengalaman layanan yang terpadu.
3. Penguatan ekosistem data daerah
Meningkatkan kualitas, keterpaduan, interoperabilitas, keamanan, dan

pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

4. Pengembangan layanan publik digital yang berorientasi masyarakat
Mendorong layanan yang *user-centric*, mudah diakses, inklusif, responsif, proaktif, dan semakin terintegrasi dalam satu ekosistem layanan.
5. Penguatan infrastruktur dan teknologi digital
Menjamin ketersediaan infrastruktur digital yang andal, aman, terjangkau, interoperabel, dan berkelanjutan hingga menjangkau seluruh wilayah daerah.
6. Penguatan kapasitas SDM dan budaya digital ASN
Meningkatkan kompetensi digital, kepemimpinan digital, kemampuan analisis data, manajemen perubahan, serta budaya kerja kolaboratif dan inovatif.
7. Penguatan keamanan, kepercayaan, dan inovasi digital
Membangun ketahanan siber, perlindungan data, manajemen risiko teknologi, sekaligus menciptakan ruang inovasi untuk pemanfaatan teknologi baru secara bertanggung jawab.

Sasaran yang ingin dicapai

Arah kebijakan tersebut dapat diturunkan menjadi sasaran pembangunan daerah:

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik melalui ekosistem Pemerintah Digital yang terintegrasi, berbasis data, aman, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat.”

Dengan sasaran antara:

- 1 meningkatnya integrasi sistem dan layanan digital ant perangkat daerah;
- 2 meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan;
- 3 meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik digital;
- 4 meningkatnya efisiensi proses bisnis pemerintahan;
- 5 meningkatnya kompetensi dan kapasitas digital ASN;
- 6 meningkatnya keandalan dan pemerataan infrastruktur digital;
- 7 meningkatnya keamanan dan perlindungan data pemerintah; dan
- 8 meningkatnya inovasi serta dampak digitalisasi terhadap kinerja pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disesuaikan dengan program/kegiatan, yaitu;

1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.
2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:
 - a. Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Penguatan karakter kebangsaan; dan
 - c. Deradikalisasi.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah memperhatikan:
 - a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
 - b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data.
 - c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.
 - d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan

- e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. URUSAN STATISTIK

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS telah melaksanakan Sensus Penduduk dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia

TUJUAN/SASARAN

Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta menjadi menuju satu data kependudukan Indonesia

C. URUSAN PERSANDIAN

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Hal ini diwujudkan dengan:

1. Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan urusan Pemerintah daerah Bidang persandian meliputi:

1. Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Yang dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi

- b. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi
- c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik
- d. Penyediaan layanan keamanan informasi



BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2027 dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, namun pada Tahun 2027 ini ada penyesuaian nomenklatur dari Kementerian Dalam Negeri pada sub kegiatan.

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 dan prakiraan maju Tahun 2028, maka dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini;

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kota Bandung
Sebelum Revisi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2027(Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	-		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	

2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan	132.090.000,00		1 Laporan	145.299.000,00
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	19.396.699.146,87		77 orang	21.336.369.061,56
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket	88.215.030,00		1 paket	190.000.000,00
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	3 Paket	323.177.279,00		3 Paket	355.495.006,90
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	34.225.299,80		3 Paket	37.647.829,78
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	30.000.000		2 paket	33.000.000,00
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	74.695.669,56		12 Dokumen	82.165.236,52

2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	486.000.000,00		12 laporam	534.600.000,00
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	300.000.000,00		12 laporam	330.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bandung	1 Unit	186.000.000,00		1 Unit	204.600.000,00
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	26.092.105,66		12 laporam	28.701.316,23
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	Kota Bandung	12 laporam	3.334.526.714,00		12 laporam	3.667.979.385,40
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			100%	

2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	805.980.420,00		29 Unit	886.578.462,00
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	204 Unit	109.390.160,00		204 Unit	120.329.176,00
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 unit	150.059.790,00		1 unit	165.065.769,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	3,0			3,0	
						Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung	4			4	
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung	0,4			0,4	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,70			88,80	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	94%			94%	

2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Bandung	4 Laporan	2.678.212.000,00		4 Laporan	2.946.033.200,00
2	16	02	2.01	0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	100%	483.000.000,00		5 permohonan	531.300.000,00
2	16	02	2.01	0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Kota Bandung	200.500 Orang	877.452.296,00		200.500 Orang	965.197.525,60
2	16	02	2.01	0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Kota Bandung	10 dokumen	210.000.000,00		10 dokumen	231.000.000,00
2	16	02	2.01	0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	3 Rekomendasi	1.120.000.000,00		3 Rekomendasi	1.232.000.000,00

2	16	02	2.01	0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	50 orang	31.283.426,00		300 orang	34.411.768,60
2	16	02	2.01	0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	1 Komunitas	22.000.000,00		1 Komunitas	24.200.000,00
2	16	02	2.01	0032	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	12 konten	62.295.480,00		12 konten	68.525.028,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Kota Bandung	10,00			10,00	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Kota Bandung	16,20			16,20	
						Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00			3,00	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	10,00			10,00	
2	16	03	2.01		Kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola Diskominfo	Kota Bandung	5 aplikasi			5 aplikasi	

2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kota Bandung	5 Dokumen	852.504.788,00		5 Dokumen	937.755.266,80
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	Kota Bandung	118 Aplikasi			122 Aplikasi	
						Cakupan leveling Pemerintahan Digital	Kota Bandung	3			3	
						Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	Kota Bandung	1,64%			1,64%	
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Bandung	1 Laporan	256.027.705,00		1 Laporan	281.630.475,50
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	2 Dokumen	328.562.680,00		2 Dokumen	361.418.948,00
2	16	03	2.02	0040	Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	200 PD	1.738.562.500,00		200 PD	1.912.418.750,00

2	16	03	2.02	0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	203.579.900,00		2 Dokumen	223.937.890,00
2	16	03	2.02	0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	211.437.170,00		4 aplikasi	232.580.887,00
2	16	03	2.02	0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	200 PD	4.764.927.404,00		200 PD	5.241.420.144,40
2	16	03	2.02	0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	Kota Bandung	35 Aplikasi	1.168.496.110,00		35 Aplikasi	784.790.721,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	5,80			5,80	
						Indeks Pembangunan Statistik	Kota Bandung	3,06			3,07	

2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%			100%	
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	100%	204.218.834,00		100%	224.640.717,40
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	100%	247.301.146,00		100%	272.031.260,60
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	30 Orang	364.123.020,00		30 orang	400.535.322,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	3,70			3,70	
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	7 Aplikasi			7 Aplikasi	

2	21	02	2.01	0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		7 Perangkat Daerah	341.709.030,00		7 Perangkat Daerah	375.879.933,00
					JUMLAH				41.642.845.103,89			45.399.538.081,28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kota Bandung
Setelah Revisi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2027(Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							

2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	-		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan	132.090.000,00		1 Laporan	145.299.000,00
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	19.396.699.146,87		77 orang	21.336.369.061,56
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket	88.215.030,00		1 paket	190.000.000,00
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			100%	

2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	3 Paket	323.177.279,00		3 Paket	355.495.006,90
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	34.225.299,80		3 Paket	37.647.829,78
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	30.000.000		2 paket	33.000.000,00
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	74.695.669,56		12 Dokumen	82.165.236,52
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	486.000.000,00		12 laporam	534.600.000,00
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	300.000.000,00		12 laporam	330.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bandung	1 Unit	186.000.000,00		1 Unit	204.600.000,00
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			100%	

2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	26.092.105,66		12 laporam	28.701.316,23
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	Kota Bandung	12 laporam	3.334.526.714,00		12 laporam	3.667.979.385,40
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			100%	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	805.980.420,00		29 Unit	886.578.462,00
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	204 Unit	109.390.160,00		204 Unit	120.329.176,00
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 unit	150.059.790,00		1 unit	165.065.769,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	1,9			2,0	

						Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung	4			4	
						Nilai Penerapan Pemerintah Digital layanan informasi masyarakat melalui Radio Sonata	Kota Bandung	1,9			2,0	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,70			88,80	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	94%			95%	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Bandung	4 Laporan	2.678.212.000,00		4 Laporan	2.946.033.200,00
2	16	02	2.01	0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	100%	483.000.000,00		100%	531.300.000,00

2	16	02	2.01	0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Kota Bandung	250.000 Orang	877.452.296,00		251.000 Orang	965.197.525,60
2	16	02	2.01	0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Kota Bandung	10 dokumen	210.000.000,00		10 dokumen	231.000.000,00
2	16	02	2.01	0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	3 Rekomendasi	1.120.000.000,00		3 Rekomendasi	1.232.000.000,00
2	16	02	2.01	0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	50 orang	31.283.426,00		300 orang	34.411.768,60
2	16	02	2.01	0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	1 Komunitas	22.000.000,00		1 Komunitas	24.200.000,00
2	16	02	2.01	0032	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	12 konten	62.295.480,00		12 konten	68.525.028,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Aplikasi	Kota Bandung	2,00			2,33	

						Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	Kota Bandung	2,00			2,00	
						Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintah Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintah Digital/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3			3,00	
						Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	2,00			3,00	
2	16	03	2.01		Kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola Diskominfo	Kota Bandung	5 aplikasi			5 aplikasi	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kota Bandung	5 Dokumen	852.504.788,00		5 Dokumen	937.755.266,80
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang sudah memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP))	Kota Bandung	95%			96%	

					Cakupan leveling Pemerintahan Digital	Kota Bandung	2,2			2,5	
					Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	Kota Bandung	1,64%			1,64%	
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Bandung	1 Laporan	256.027.705,00		1 Laporan	281.630.475,50
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Bandung	2 Dokumen	328.562.680,00		2 Dokumen	361.418.948,00
2	16	03	2.02	0040	Penyediaan akses internet	Kota Bandung	1 Perangkat Daerah	1.738.562.500,00		1 Perangkat Daerah	1.912.418.750,00
2	16	03	2.02	0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Kota Bandung	2 Dokumen	203.579.900,00		2 Dokumen	223.937.890,00
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas						
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas						
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo						

2	16	03	2.02	0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	211.437.170,00		4 aplikasi	232.580.887,00
2	16	03	2.02	0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	1 Perangkat Daerah	4.764.927.404,00		1 Perangkat Daerah	5.241.420.144,40
2	16	03	2.02	0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	Kota Bandung	35 Aplikasi	1.168.496.110,00		35 Aplikasi	1.285.345.721,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	Kota Bandung	68			70,2	
						Indeks Pembangunan Statistik	Kota Bandung	3,05			3,06	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%			100%	

2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	100%	204.218.834,00		100%	224.640.717,40
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	100%	247.301.146,00		100%	272.031.260,60
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	30 Orang	364.123.020,00		30 orang	400.535.322,00
2	20	02	2.01	0023	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	Kota Bandung	18%			19%	100.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Persandian	Kota Bandung	2,00			2,00	

2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	7 Aplikasi			7 Aplikasi	
2	21	02	2.01	0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian		Kota Bandung	1 Dokumen		1 Dokumen	100.000.000,00
2	21	02	2.01	0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kota Bandung	7 Perangkat Daerah	341.709.030,00		7 Perangkat Daerah	375.879.933,00
					JUMLAH				41.642.845.103,89			46.100.093.081,28

- Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai rencana dan tujuan diperlukan mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dalam mendukung pelayanan, kinerja maupun data pendukung dari berbagai perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Bandung.

Data Mitra Perangkat Daerah Dalam Mendukung Kinerja Diskominfo

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan SPBE	Bapperida Inspektorat Bagian Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Tata Kelola SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM,DPMPTS P, DISDUKCAPIL, Bag. Organisasi, Bag. Pengadaan	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Manajemen SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, Disarpus, Bag. Organisasi, Bag. Balap	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Layanan SPBE	Disdukcapil, DPMPTSP, Disnaker, Bag. Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Layanan dinas ke masyarakat	Bagian Organisasi	Tersedianya dokumen IKM

Sedangkan mitra kerja PD selain mendukung Indikator Kinerja Utama juga mendukung kinerja layanan kepada masyarakat, yaitu;

NO	LEMBAGA/ KEMENTERIAN/ PD/ORGANISASI	URAIAN	KETERANGAN
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Evaluasi dan penilaian Smart City;	Nilai Smart City
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai SPBE

3	Badan Siberi dan Sandi Nasional (BSSN)	Pelatihan keamanan data dan sertifikasi keamanan informasi	Sertifikasi
4	BPS Kota Bandung	Data Bandung satu Data	
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kerjasama sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi di tingkat kelurahan
6	Relawan TIK (RTIK)	Sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa serta generasi muda	
7	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bandung Open Data, Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) dan sebagainya.	



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Diskominfo Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2025 - 2029, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Diskominfo Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo, menggunakan Norma, Standar Prosedur dan Kaidah (NSPK) Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat PD berdasarkan Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, seperti yang tergambarkan pada table berikut :

Tabel 5.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030
Sebelum Revisi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	Nilai	4,62	4,65	4,68	4,71	4,72	4,74
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	95,90	95,91	95,92	95,93	95,94	95,95

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2030
Setelah Revisi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Lingkup Kewenangan Diskominfo	Nilai	NA	1,87	2,0	2,3	2,4	2,5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	96,05	96,06	96,07	96,08	96,09	96,10

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo berdasar pada Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029, pada Tahun 2025 terealisasi, yaitu dapat di lihat pada Tabel 5.2 di bawah ini;

Tabel 5.3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,62	4.66	100,87%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,90	96,05	100,16%

Keterangan; IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari Tabel tersebut tersebut, di atas menunjukan bahwa realisasi target IKU yang memiliki 2 indikator pada tahun 2025 tercapai sesuai dengan harapan.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam Bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci perusan dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut;

Tabel 5.4

IKATOR KINERJA KUNCI 2025-2030

Sebelum Revisi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN KOMINFO								

1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	7,14%	100%	100%	100%	100%	100%	2025 untuk internet opd belum dianggarkan, dan rencana akan dianggarkan ditahun 2026
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	30%	100%	100%	100%	100%	100%	jip opd untuk tahun 2025 belum dianggarkan dan rencana akan dianggarkan ditahun 2026. untuk target jip 2025 ditempuh dengan upaya penarikan fo opd ke odc diskominfo
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persentase	90%	95%	100%	100%	100%	100%	Pemanfaatan layanan SPLP di Kota Bandung baru dimulai tahun 2023, maka data 2022 dianggap 0
	URUSAN STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3.025	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	
	URUSAN PERSANDIAN								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	Persentase	67	69	72	75	77	80	Indeks KAMI versi 5.0 baru diberlakukan tahun 2025, akan tetapi pada tahun 2024 sempat dilakukan verifikasi oleh BSSN.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.5
IKATOR KINERJA KUNCI 2025-2030
Setelah Revisi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					RUMUS
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN KOMINFO									
1	Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;	%	13,09%	7,14%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100%
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi ;	%	20,00%	36%	52%	68%	84%	100%	100%	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan <u>secara online dan terintegrasi</u> Jumlah layanan publik x 100%

3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	%	NA	NA	10%	10%	10%	10%	10%	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaan penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah <u>kabupaten/kota</u> Jumlah penduduk x 100%
	URUSAN STATISTIK									
1	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah.	%	NA	NA	50%	54%	56%	65	70%	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data <u>berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah</u> Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah X 100%
	URUSAN PERSANDIAN									
1	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	64	64	67	70	72	74	77	Nilai indeks Keamanan Informasi [KAMI] hasil <u>verifikasi</u> Nilai optimal indeks Keamanan Informasi(KAMI) (918)

Realisasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 5.6

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
	URUSAN KOMINFO				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	7,14%	1,64	Pada Tahun 2025 pagu anggaran internet diserahkan pada OPD masing-msing
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	30%	100%	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persentase	90%	100%	
	URUSAN STATISTIK				

1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3.03	3,04	
	URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintahan daerah	Persentase	67	64	IKK pada Tahun 2025 berpedoman kepada Permendagri No.19 Tahun 2024 yang mengacu kepada Indeks KAMI (Keamanan Informasi) versi 5.0 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

*Sumber Diskominfo

Berdasarkan hasil realisasi dari target IKK, menunjukan bidang urusan Kominfo adanya penurunan realisari dari target, yaitu ; Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo hanya terealisasi 1,64 % berdasarkan prosentase jumlah perngkat daerah sebanyak 60 PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sedangkan bidang urusan statistik sesuai berdasarkan hasil penilaian oleh BPK RI telah melebihi dari target yang ditentukan dan Bidang Urusan Persandian tidak memenuhi target karena adanya perbedaan penilaian dan BSSN.



BAB VI PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2027 Revisi ini merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini, maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang

berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Adanya Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, 13 Agustus 2026

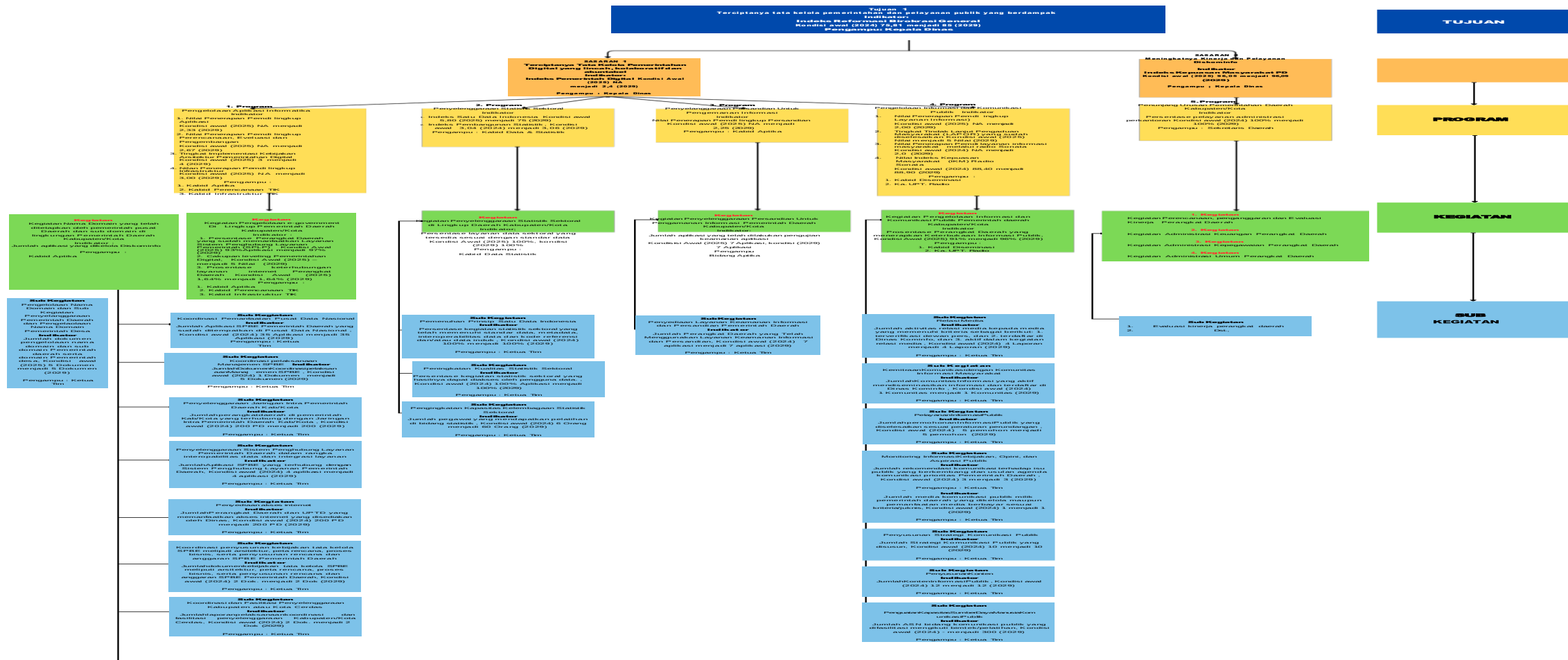
**Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung**



Henryco/Arie Sapiie, SE.AK
Nip. 197106211998061001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Cascading 2025 - 2029 Pelaksanaan Program Diskominfo Kota Bandung



CROSSCUTTING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

